



Pengaruh Modal dan Investasi Teknologi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Nangroe Aceh Darussalam Setelah Dibelakukan Syariat Islam

Safriadi M Yunus Aks

Prodi Manajemen, Universitas Gunadarma

E-mail: safriadi04@gmail.com

Abstract. *The existence of the policy of the Government of the Republic of Indonesia, providing special autonomy to the Province of Nangroe Aceh Darussalam (NAD) through the concept of asymmetric decentralization, accompanied by the issuance of a law implementing Islamic Sharia in Aceh in a comprehensive manner, as well as opening up opportunities for the government and the people of Aceh Province to increase the rate of economic development which is based on religious values. The aim of this research is to analyze the influence of capital issued by the government and technology investment on the regional economic growth of Aceh province. The target population is districts/cities in Aceh Province, while the sample consists of 23 analysis units (5 cities and 18 districts). Secondary data is on a ratio scale, to measure research variables, namely; capital, technology investment and regional economic growth for the 2011 - 2020 period, sourced from the NAD Provincial Central Statistics Agency. Data analysis techniques use descriptive statistics and regression analysis to test research hypotheses. The research results show that, specifically and simultaneously, capital and technology investment have a significant influence on the regional economic growth of Aceh Province. Partially, capital and technology investment are determinants of regional economic growth in Aceh Province. These two variables have the effect of increasing regional economic growth. Provinces that have large capital and investment in quality and innovative technology will have an impact on high economic growth in Aceh Province. Thus, it indicates that in general the intensity of implementation of Islamic Sharia in Aceh province has provided a meaningful role for the capital sector and technology investment in increasing regional economic growth.*

Keywords: *Role of Capital, Technology Investment, Regional Economic Growth*

Abstrak. Adanya kebijakan Pemerintah Republik Indonesia, memberikan otonomi khusus kepada Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) melalui konsep desentralisasi asimetris, dengan diiringi terbitnya undang-undang pemberlakuan Syariat Islam di Aceh secara kaffah, serta membuka peluang bagi pemerintah dan masyarakat Provinsi Aceh dalam meningkatkan laju pembangunan ekonomi yang dilandasi pada nilai keagamaan. Adapun tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh modal yang dikeluarkan pemerintah dan investasi teknologi terhadap pertumbuhan ekonomi regional provinsi Aceh. Yang menjadi target populasi adalah kabupaten/kota di Provinsi Aceh, sedangkan sampel berjumlah 23 unit analisis (5 kota dan 18 kabupaten). Data sekunder dalam skala ratio, untuk mengukur variabel penelitian yaitu; modal, investasi teknologi, dan pertumbuhan ekonomi regional periode 2011 - 2020, yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi NAD. Teknik analisa data menggunakan statistik descriptive dan analisa regresi untuk menguji hipotesa penelitian. Hasil penelitian menunjukkan, secara parsial dan secara simultan modal dan investasi teknologi memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional Provinsi Aceh. Secara parsial, modal, investasi teknologi yang merupakan determinan pertumbuhan ekonomi regional Provinsi Aceh. Kedua variabel tersebut berpengaruh meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional. Provinsi yang memiliki modal yang besar dan investasi teknologi berkualitas dan inovatif, akan memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Provinsi Aceh. Dengan demikian, mengindikasikan bahwa secara umum intensitas penerapan Syariat Islam di provinsi Aceh sudah memberikan peran yang bermakna pada sektor modal dan investasi teknologi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional.

Kata Kunci: Peran Modal, Investasi Teknologi, Pertumbuhan Ekonomi Regional

LATAR BELAKANG PENELITIAN

Otonomi khusus yang diterima pemerintah propinsi Aceh, merupakan salah satu kewenamngan yang diberikan oleh pemerintah pusat berdasarkan konsep desentralisaai asimetris, yang bertujuan untuk menarik perhatian masyarakat Provinsi Aceh, agar tetap berada dalam kesatuan NKRI, sehingga dapat merujuk pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan tersebut memberikan peluang yaang besar bagi pemerintahn Propinsi Aceh dalam mengelola daerahnya. Kewenangan yang diterima oleh pemerintah aceh dalam mengelola daerahnya, seperti: mengatur bidang administrasi daerah, bidang politik, memberikan peluang dalam bidang akomoasi identitas lokal, sampai dengan mengatur dalam bidang keuangan, sebagaimana yang diatur dalam undang – undang peraturan Pemerintah Aceh. Pemerintah Aceh harus benar- benar melaksanakan apa yang menjadi kebijakan desentralisasi tersebut, sehingga pemerintah terancam gagal dalam pencapaian pelaksanaan yang telah menjadi amanat Undang – undang peraturan pemerintah Aceh tersebut.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal, bertutujan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Propinsi Aceh dengan cepat, yang dilakasanakan setelah adanya perjanjian damai antara pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan pemerintah republik Indonesia, yaitu pada tanggal 15 Agustus 2005, (Suadi zainal, 2015) perjanjian antara pihak gerakan aceh merdeka dengan republik indonesia lebih dikenal dengan sebutan MoU Helsinki, yang mana konsep perjanjian tersebut dituangkan dalam Undang – Undang No..11 tahun 2026, yaitu tentang Undang – Undang pemerintahan Aceh.

Kebijakan desentralisasi fiskal dimulai sejak tahun 2001 yang bertujuan untuk mendorong perekonomian daerah dan mengurangi ketimpangan pendapatan antar daerah di Indonesia. Dengan kebijakan desentralisasi fiskal dimana pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur keuangannya sendiri diharapkan memberi pengaruh yang baik terhadap pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja, dan kemiskinan yang populer disebut triple track strategy (pro growth, pro job, dan pro poor). Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mencapai tujuannya adalah dengan meningkatkan pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Peningkatan pendapatan daerah dan besarnya dana transfer, (Indah 2011)

Sejak diberlakukan secara resmi pada tanggal 4 Januari 2019, Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) telah menjadi terobosan penting bagi transaksi keuangan di Aceh. Seiring dengan status keistimewaan Aceh, penerbitan aturan tersebut diterapkan sesuai tindak lanjut dari Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam, di mana setiap lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh harus

berdasarkan prinsip syariah. Penerapan qanun Lembaga Keuangan Syariah telah memberi dampak bagi perekonomian di Aceh, salah satunya dengan mengalihkan seluruh aktivitas, produk dan lembaga keuangan, termasuk perbankan, pada syariat Islam dalam kurun waktu paling lama tiga tahun setelah qanun diundangkan. Maka dari itu, seluruh layanan keuangan konvensional dan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah tidak dapat diberlakukan. Sementara itu, apabila masyarakat tetap berkeinginan untuk menggunakan layanan bank konvensional, maka transaksinya harus dilakukan di luar Aceh.

Adanya pemberlakuan syariat islam, serta pemberian otonomi daerah bagi propinsi Aceh, berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi regional. Berdasarkan data yang didapat dari BPS propinsi Aceh tahun 2011 - 2020, menggambarkan pertumbuhan ekonomi propinsi Aceh, ditinjau berdasarkan produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan di pulau Sumatra.

Tabel 1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2011 – 2020 Pulau Sumatera (Persen)

Provinsi	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Aceh	3.28	3.85	2.61	1.55	-0.73	3.29	4.18	4.61	4.14	-0.37
Sumatera Utara	6.66	6.45	6.07	5.23	5.10	5.18	5.12	5.18	5.22	-1.07
Sumatera Barat	6.34	6.31	6.08	5.88	5.53	5.27	5.30	5.14	5.01	-1.60
Riau	5.57	3.76	2.48	2.71	0.22	2.18	2.66	2.35	2.81	-1.12
Jambi	7.86	7.03	6.84	7.36	4.21	4.37	4.60	4.69	4.37	-0.46
Sumatera Selatan	6.36	6.83	5.31	4.79	4.42	5.04	5.51	6.01	5.69	-0.11
Bengkulu	6.85	6.83	6.07	5.48	5.13	5.28	4.98	4.97	4.94	-0.02
Lampung	6.56	6.44	5.77	5.08	5.13	5.14	5.16	5.23	5.26	-1.67
Bangka Belitung	6.90	5.50	5.20	4.67	4.08	4.10	4.47	4.45	3.32	-2.30
Kep.Riau	6.96	7.63	7.21	6.60	6.02	4.98	1.98	4.47	4.84	-3.80

Sumber; Badan Pusat Statistik (BPS), 2020

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh yang hitung berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan, pada tahun 2011 pertumbuhan ekonomi sebesar 3,28% yang merupakan laju pertumbuhan dari tahun sebelumnya, pada tahun 2012 pertumbuhan meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 3,85%, sedangkan tahun 2013 pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh menurun sebesar 2,61%, pertumbuhan ekonomi terendah terjadi pada tahun 2014 dan 2015 sebesar -0,73% menunjukkan pertumbuhan ekonomi terendah setelah Provinsi Riau. Pada

tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 3,29% pertumbuhan tersebut melebihi pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau, pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan sebesar 4,18% pertumbuhan tersebut melebihi pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau dan kepulauan Riau, pada tahun 2018 meningkat sebesar 4,61% peningkatan tersebut melebihi pertumbuhan ekonomi Provinsi Bangka Belitung, Riau dan Kepulauan Riau, pada tahun 2019 pertumbuhan sebesar 4,14% pertumbuhan lebih rendah dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 menunjukkan semua Provinsi di pulau Sumatera mengalami penurunan tingkat pertumbuhan, dikarenakan adanya wabah covid-19

Adanya pemberian otonomi daerah oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah, menjadikan suatu motivasi bagi daerah – daerah yang sedang berkembang, pemberian otonomi daerah, merupakan strategi yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk dapat mencapai pemerataan dalam bidang pembangunan secara Nasional. pemerintah pusat berharap bahwa pelaksanaan otonomi daerah dapat berjalan dengan baik, dikarenakan pemerintahan daerah sudah mengenal terhadap daerahnya, sehingga akan lebih mudah dalam mengatur dan mengelolanya, sesuai dengan yang dibutuhkan daerahnya masing – masing. Pemberian otonomi daerah merupakan babak baru bagi daerah yang mendapatkannya, dan ini sudah dimulai sejak bulan Januari tahun 2001, hal ini merupakan perwujudan dari desentralisasi bagi Provinsi maupun kabupaten / kota, (Abubakar Hamzah 2014)

Perencanaan pembangunan ekonomi daerah bukanlah perencanaan untuk suatu daerah, tetapi pembangunan ekonomi daerah bisa dianggap sebagai perencanaan untuk memperbaiki pembangunan sumber daya publik yang tersedia di daerah tersebut dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai - nilai sumberdaya swasta secara bertanggung jawab. Beberapa indikator yang dapat memberikan gambaran tentang pertumbuhan atau keadaan perekonomian suatu daerah antara lain tingkat kesempatan kerja, pertumbuhan pendapatan regional, tingkat pendapatan dan struktur pendapatan regional (BPS NAD, 2007).

Salah satu penyebab terhambatnya pertumbuhan ekonomi pada provinsi, kabupaten/kota, yaitu tingginya angka kemiskinan pada suatu daerah yang akan menyebabkan lambatnya pembangunan, baik dalam sektor infrastruktur, kesehatan dan pendidikan. Tingginya tingkat kemiskinan di suatu daerah akan menyebabkan pemerintah harus mengeluarkan biaya yang besar untuk pembangunan ekonomi, dikarenakan banyaknya masyarakat yang miskin memiliki daya beli yang rendah, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak dapat tumbuh dengan cepat, (Suliswanto 2010).

Pertumbuhan ekonomi masih menjadi indikator untuk menilai keberhasilan suatu daerah. pertumbuhan ekonomi saat ini memberikan indikasi tentang sejauh mana aktivitas perekonomian telah berdampak pada peningkatan pendapatan bagi masyarakat, tidak hanya dipengaruhi oleh sektor bidang seperti, bidang industri, pertanian, perkebunan, informasi, konstruksi, bidang jasa dan lainnya. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti faktor kepercayaan beragama dan nilai – nilai moral pengelola sumber daya alam yang ada, dengan memaksimalkan sumberdaya manusia yang berakhlak, kualitas ibadah yang baik serta muamalah atau memiliki hubungan yang baik sesama masyarakat

Muhammad Fajrii, (2016) melakukan penelitian terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan keterbukaan daerah terhadap ketimpangan antara wilayah, periode penelitian tahun 2009 – 2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa daerah di Sumatera dapat dikatakan masih belum terbuka terhadap lalu lintas perdagangan. Ketimpangan wilayah di Sumatera ini masih tergolong cukup tinggi. pemerintah tingkat provinsi di Sumatera lebih mengoptimalkan PAD untuk mengatasi ketimpangan wilayah. Sehingga untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus memperhatikan dan mengendalikan tingkat ketimpangan wilayah, harus ada dorongan kepada daerah untuk lebih aktif dalam lalu lintas perdagangan paa daerah tersebut.

Provisi Aceh juga memiliki potensi yang tidak kalah dengan provinsi lainnya, seperti sumber daya alam (SDA) yang sangat banyak serta turunya kebijakan pemerintah pusat terhadap daerah Aceh setelah adanya MoU perdamaian antara pihak Gam dan Indonesia. Hal tersebut akan menggambarkan peluang pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun karena salah satu faktor, yaitu ketidaksiapan sumber daya manusia (SDM) dalam pengemengelolannya, sehingga dikuatirkan SDA yang ada justru menjadi petaka. Kondisi tersebut dapat menyeret daerah Aceh menjadi lemah, tidak mandiri dan tergantung (dependent) pada daerah lain, akhirnya justru muncul image yang kurang menguntungkan untuk daerah Aceh, (Muchlisin, Nazir, and Musman 2012)

Konsep pertumbuhan ekonomi pada suatu Negara, propinsi, kabupaten/ Kota masih dianggap sebagai tujuan yang terpenting untuk mensejahterakan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang baik, akan menunjukkan juga pesatnya perkembangan dalam bidang informasi dan teknologi, bidang sains, bidang revolusi teknologi pada Negara- negara maju, sehingga dapat mengatasi permasalahan kemiskinan pada suatu Negara, (Lubis 2013).

Li and Huang (2021), dalam peneltiannya menyatakan ketidakpastian kebijakan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi yang substansial di Negara Tiongkok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan pada kebijakan ekonomi di China Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara proses yang memiliki kebijakan yang heterogenitas,

kebijakan fiskal dan ketidakpastian. Kebijakan moneter sebagai sarana utama kebijakan di China, memiliki dampak yang signifikan pada tingkat pertumbuhan ekonomi yang substansial dalam berbagai bidang, tetapi waktu efeknya memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi substansial, tetapi selama terjadi krisis keuangan, efeknya berlangsung dalam waktu yang lama.

Berdasarkan teori pertumbuhan ekonomi yang dikembangkan oleh Robert Solow dan Trevor Swan tersebut, yang menjadi dasar pemikiran pada penelitian ini (*Grand Teori*), serta adanya Undang - undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, sebagai pengganti dari Undang - undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah dan Undang - Undang pemerintah Aceh. yang memberikan wewenang kepada pemerintah propinsi Aceh untuk mengatur dan mengelola daerahnya sendiri, melalui konsep desentralisasi asimetris, tetapi tetap berada dalam naungan pemerintah Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Mengacu pada latar belakang di atas, yang menjadi fokus masalah pada penelitian secara umum adalah bagaimana pengaruh modal yang dikeluarkan pemerintah dan investasi teknologi terhadap pertumbuhan ekonomi regional setelah diberlakukannya syariat islam

TELAAH PUSTAKA

Pertumbuhan Ekonomi

Konsep pertumbuhan dan pembangunan ekonomi pada dasarnya tidak dapat dipisahkan, dimana konsep tersebut dijadikan panduan dasar pada suatu Negara sebagai konsep model pertumbuhan ekonomi. pembangunan ekonomi merupakan hasil usaha yang dilakukan terus menerus, menggunakan sumber daya yang ada, (Mukhlis 2009). Pada konsep tersebut menunjukkan konsep pertumbuhan ekonomi yang akan dibahas pada penelitian ini, yang akan dianalisis secara khusus, sesuai dengan variabel yang akan diteliti propinsi, kabupaten/kota tersebut.

Persoalan pertumbuhan ekonomi telah menjadi perhatian para ahli dalam wacana pemikiran ekonomi Islam klasik. Konsep dasarnya telah dirangkum baik secara eksplisit maupun implisit dalam Al-quran, sunnah maupun pemikiran - pemikiran ulama Islam terdahulu. Kekhasan pertumbuhan dan pembangunan dalam ekonomi Islam ditekankan pada perhatian yang sangat serius pada pengembangan sumberdaya manusia sekaligus pemberdayaan alam untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia, yang diwujudkan bukan hanya dalam keberhasilan pemenuhan kebutuhan material saja, melainkan juga kebutuhan dan persiapan menyongsong kehidupan akhirat, (Muttaqim 2018)

Modal

Pada pedoman Pengelolaan keuangan daerah, menjelaskan bahwa belanja modal disahkan menurut kelompok pengeluarannya yang terdiri dari pengeluaran langsung dan pengeluaran tidak langsung berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Belanja langsung merupakan kegiatannya dianggarkan berhubungan secara langsung dalam pelaksanaan kegiatan dan program, dalam belanja langsung di kelompokan menurut jenis belanja terdiri dari: pengeluaran untuk pegawai, pengeluaran untuk membeli barang dan jasa sebagai modal. Sedangkan pengeluaran tidak langsung, yaitu pengeluaran yang telah dianggarkan, akan tetapi tidak langsung berhubungan dalam pelaksanaan program pada kegiatan suatu daerah.

Berdasarkan Permendagri No 13 Tahun 2006 yang di ubah menjadi Permendagri No 59 Tahun 2007 pasal 53 ayat (1), Semua pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dan setahun untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahannya itulah manfaat lebih dan setahun untuk di gunakan dalam kegiatan pemerintahan itulah yang terdapat dalam belanja modal. Ayat (2) anggaran belanja modal harus sesuai dengan anggaran yang telah di tetapkan. Ayat (3) Kepala daerah menetapkan batas minimal keuangan sebagai dasar pembebanan belanja modal

Investasi

Investasi adalah pengeluaran-pengeluaran yang ditujukan untuk meningkatkan atau mempertahankan persediaan barang modal (*capital stock*) terdiri dari pabrik, mesin kantor, dan produk-produk tahan lama lainnya (Dornbusch dan Fischer, 2004).

Investasi adalah penambahan barang modal secara netto yang positif. Investasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu investasi riil dan investasi finansial. Yang dimaksud dengan investasi riil adalah investasi terhadap barang – barang tahan lama (barang-barang modal) yang akan digunakan dalam proses produksi. Sedangkan investasi finansial adalah investasi terhadap surat-surat berharga, misalnya pembelian saham, obligasi, dan surat bukti hutang lainnya. Pertimbangan-pertimbangan utama yang perlu dilakukan dalam melakukan (memilih) suatu jenis investasi riil adalah tingkat bunga pinjaman yang berlaku, tingkat pengembalian (*rate or return*), dari barang modal, dan prospek (harapan berkembang) proyek investasi, (Eliza 2010).

Dalam praktiknya, dalam usaha untuk mencatat nilai penanaman modal yang dilakukan dalam suatu tahun tertentu, yang digolongkan sebagai investasi (atau pembentukan modal atau penanaman modal) meliputi pengeluaran-pengeluaran sebagai berikut: 1) Pembelian berbagai jenis barang modal, yaitu mesin-mesin dan peralatan produksi lainnya untuk mendirikan berbagai jenis industri dan perusahaan, 2) Pengeluaran untuk mendirikan rumah tempat tinggal,

bangunan kantor, bangunan pabrik dan bangunan-bangunan lainnya, dan 3) Pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual, bahan mentah dan barang yang masih dalam proses produksi pada akhir tahun perhitungan pendapatan nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan fokus pada Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang dengan sampel terdiri dari 23 (dua puluh tiga) kabupaten dan kota. Ada tujuh variabel yang akan digunakan pada penelitian ini, yaitu lima variabel independen, satu variabel dependen serta satu variabel moderating. Data penelitian yang digunakan adalah data sekunder, yaitu laporan tentang propinsi aceh dalam angka yang sudah dipublikasi, dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2020, dimulai pada tahun setelah diberlakukannya peraturan syariat Islam di Aceh.

Populasi dan sampel

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah propinsi Aceh, yang terdiri dari 18 kabupaten dan 5 Kota dan sampel pada penelitian adalah 23 kabupaten dan kota Propinsi Aceh, dengan variabel terkait, yaitu: modal, investasi teknologi, dan pertumbuhan ekonomi regional. Data yang digunakan periode tahun 2011 – 2020.

Metode Analisa Data

Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah regresi linier berganda yang digunakan untuk menguji pengaruh modal dan investasi teknologi terhadap pertumbuhan ekonomi regional propinsi Aceh. Untuk pengolahan data yang telah terkumpul, peneliti menggunakan software Eviews, Amos dan SPSS sebagai alat uji analisa data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2. Hasil Uji Pengaruh Modal dan Investasi Teknologi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Propinsi Aceh

Variabel	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-2617074.	1221945.		-2.141728	0.0333
Modal	1.699502	0.160816	0,412	10.56796	0.0000
Investasi Teknologi	1.260459	0.134408	0,238	9.377843	0.0000
R²	0.895				
Adjus. R²	0.891				
F-Statistics	187.336				
Sign.	0.000				

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi Regional

Dari tabel hasil uji menunjukkan bahwa, modal dan investasi teknologi secara simultan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional, maka didapat persamaan: $Y = -1171965,761 + 1,6995X_1 + 1,260X_2$. Dapat diartikan bahwa: Setiap ada peningkatan dari jumlah modal satu kali, maka pertumbuhan ekonomi provinsi Aceh akan ikut meningkat sebesar 1,6995, dengan asumsi bahwa variabel lain, seperti investasi teknologi adalah konstan. Setiap ada peningkatan dari investasi teknologi satu kali, maka pertumbuhan ekonomi provinsi Aceh akan meningkat sebesar 1,260, dengan asumsi variabel lain, seperti modal adalah konstan.

Didapat nilai F_{hitung} sebesar 187,336 dengan nilai signifikansinya sebesar $0,000 < 0,05$, maka hipotesis diterima, secara statistik dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan secara simultan, modal dan investasi teknologi terhadap pertumbuhan ekonomi regional provinsi Aceh. Didapat nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0,891 atau sebesar 89,1%, yang artinya secara simultan pertumbuhan ekonomi regional provinsi Aceh dapat dijelaskan oleh modal dan investasi teknologi sebesar 89,1%, sedangkan sebesar 10,9% lagi dijelaskan oleh faktor lain, yang tidak penulis masukkan pada penelitian ini

Secara parsial, modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional, didapat nilai t_{hitung} sebesar 10.56796 dan nilai signifikansi sebesar 0,0000, nilai tersebut $< 0,05$. Investasi teknologi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional, didapat nilai t_{hitung} sebesar 9.377843 dan nilai signifikansi sebesar 0,0000, nilai tersebut $< 0,05$. Maka dapat disimpulkan, secara parsial, modal dan investasi teknologi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional Provinsi Aceh ditinjau pada periode 2011 – 2020.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

- a. Secara simultan modal dan investasi teknologi berpengaruh sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi NAD.
- b. Secara parsial, modal dan investasi teknologi adalah determinan pertumbuhan ekonomi Provinsi Nangroe Aceh Darusalam. Kedua variabel tersebut berpengaruh meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional Propinsi Aceh. Indikasinya adalah Kabupaten/kota yang memiliki modal yang besar, investasi teknologi yang moderat dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional.

- c. Pemberlakuan syariat islam memberikan peran yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional.

Saran

Implikasi empiris yang diperoleh adalah model penelitian ini memberikan kontribusi yang sangat signifikan baik secara simultan maupun parsial dan peran pemberlakuan syariat islam sangat mendominasi, sehingga pihak pemerintah harus selalu mendukung dan memberikan wadah pada setiap daerah dalam menjalankan kegiatannya, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional

Implikasi pragmatis yaitu dengan proses berbagai variasi serta hadirnya perusahaan manufaktur, maka akan mampu memberikan dampak ekonomi yang besar, maka perlu diimbangi dengan industri pengolahan yang lebih baik, sehingga tidak hanya bisa mengandalkan komoditi bahan mentah, tapi juga dapat dikirim produksi barang setengah jadi hingga produk jadi, yang akan mampu meningkatkan perekonomian Aceh dan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Kemudian fakta peningkatan jumlah penduduk memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi NAD, maka pemerintah daerah Aceh harus terus memperhatikan, mengimbangi antara jumlah penduduk dengan sumber daya manusia (SDM) potensial (Tenaga kerja produktif) yang tersedia, membekali pelatihan-pelatihan terkait kompetensi SDM dan peningkatan layanan kesehatan masyarakat khususnya membuka diri untuk menyosong *Revolution of Industry 4.0 & society 5.0* dan *Sustainable Development Goals 2030*.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusalim, Lestari. 2016. "Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pedapatan Dan Desentralisasi Di Indonesia." *Kinerja* 20 (1): 53. <https://doi.org/10.24002/kinerja.v20i1.697>.
- Budiono, Sidik. 2011. "Teknologi, Perdagangan Internasional Ekonomi Klasik Ke Perdagangan Internasional" 6.
- Dumairy. 1997. *Perekonomian Indonesia*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Dornbusch, Rudiger & Fischer. (2004). *Macroeconomics* (9th ed). Mc Graw – Hill Companies. New York
- Eliza, Yulina. 2010. "Pengaruh Investasi, Angkatan Kerja Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sumatera Barat," 200–210.
- Li, Junchao, and Shan Huang. 2021. "The Dynamic Relationship between Economic Policy Uncertainty and Substantial Economic Growth in China." *Marine Economics and Management* ahead-of-p (ahead-of-print). <https://doi.org/10.1108/maem-04-2021-0003>.
- Muchlisin, Z A, Muhammad Nazir, and Musri Musman. 2012. "Pemetaan Potensi Daerah

- Untuk Pengembangan Kawasan Minapolitan Di Beberapa Lokasi Dalam Provinsi Aceh: Suatu Kajian Awal.” *Depik* 1 (1): 68–77. <https://doi.org/10.13170/depik.1.1.29>.
- Mukhlis, Imam. 2009. “Eksternalitas , Pertumbuhan Ekonomi Dan Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perspektif Teoritis.” *Jurnal Ekonomi Bisnis*, no. 3: 191–99.
- Muttaqim, Rizal. 2018. “Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam Economic Growth in Islamic Perspective.” *Maro, Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 1 (2): 117–22. <http://jurnal.unma.ac.id/index.php/Mr/index>.
- Mangkoesoebroto. 1993. *Ekonomi Publik (Edisi 3)*. Yogyakarta : BPFE UGM